

Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penanganan Konflik Di Desa Bulotalangi Barat

Mariani Abdullah¹, Abdul Rahmat², Mohamad Zubaidi³, Muhammad Ibrahim⁴

Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo
mariani_s1pls2019@mahasiswa.ung.ac.id¹

Received: 5 Mey 2023 Revised: 26 Februari 2023 Published: 29 Februari 2024

ABSTRACT

This study aimed at describing the leadership role of Village Head in Bulotalangi Barat Village. This research was classified as descriptive research with a qualitative approach. The number of informants in this study amounted to 7 people. The data analysis technique adopted the Milles and Huberman models.

The research findings indicated that in playing a role as a facilitator, the village head and other village government apparatus applied discussion strategy in dealing with clean water conflict. In this case, the village head was the authorized one to mediate or facilitate community needs. In addition, as a facilitator, the village head has been helpful in providing clean water facility for Bulotalangi Barat community. Thus, the previous conflict on clean water in the community has been solved so their daily needs have been met. In the meantime, as a motivator, the village head has urged the community to resolve any conflict through deliberation instead of being egocentric. It is due to clean water being a common issue, not an individual one, in the Bulotalangi Barat Village.

Keywords: Leadership, Village Head, Conflict

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penanganan Konflik di Desa Bulotalangi Barat. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif, dengan pendekatan Kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa sebagai fasilitator diperoleh bahwa strategi yang digunakan oleh kepala desa dan unsur pemerintah desa lainnya dalam menangani konflik air bersih yaitu dengan di adakan musyawarah untuk menuju mufakat, dalam hal ini kepala desa yang memiliki kedudukan atau status sehingganya kepala desa memediasi apa yang menjadi kebutuhan didalam masyarakat. Disisi lain peran kepala desa sebagai fasilitator cukup membantu masyarakat Bulotalangi Barat hal ini terlihat sesuai realita yang di dapatkan di lapangan menunjukkan bahwa kepala desa mampu memfasilitasi masyarakat dengan mengadakan kembali sarana air bersih yang merupakan

pemicu terjadinya konflik yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat, sehingga adanya pengadaan kembali sarana air bersih ini, masalah yang di masyarakat bisa dikatakan tidak ada lagi. Dalam penanganan konflik yang terjadi di desa Bulontalangi Barat, kepala desa juga bertindak sebagai motivator, dengan selalu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara bersama, dan membuang rasa egosentris masyarakat, karena persoalan air adalah persoalan bersama, dan bukan persoalan individual di masyarakat Bulotalangi Barat.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Konflik

©2024 by(Mariani Abdullah¹, Abdul Rahmat², Mohamad Zubaidi³, Muhammad Ibrahim⁴)
Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu wilayah kesatuan terkecil dari wilayah administratif pemerintahan yang dimana keadaan sosial kemasyarakatannya masih rentan akan pertikaian, pertentangan dan konflik, sebagaimana yang sering dijumpai bahwa konflik yang salah satunya sering terjadi seperti perang antar kelompok, suku, ras ataupun agama ataupun pertentangan dengan aparaturnya masih sering terjadi di Indonesia yaitu tepatnya pada wilayah pedesaan (Dasrizal, 2016 : 8)

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Pemerintah desa membuat kebijakan- kebijakan, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, tidak terlepas dari sosok seorang kepala desa, yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Dalam konteks pembangunan daerah, kepala desa merupakan figur terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan

pemerintah ditingkat desa/kelurahan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan desa.

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan program pemerintah daerah salah satunya pengadaan infrastruktur bidang air bersih. Air bersih tentunya memberi pengaruh yang cukup besar bagi setiap makhluk hidup yang tinggal di bumi. Hal tersebut dapat terjadi karena air adalah salah satu unsur terpenting yang menunjang kehidupan bagi seluruh makhluk, Hal tersebut sebagai pemicu adanya konflik antar masyarakat sama halnya yang terjadi di desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango.

Sebagai makhluk sosial, kondisi lingkungan yang damai, aman, dan tentram merupakan suatu hal yang di cita-citakan. Hidup secara berdampingan dan saling bergantung satu sama lainnya adalah suatu keadaan yang terjadi dalam kehidupan manusia pada umumnya. Sebagai makhluk sosial, tidak akan luput dari namanya konflik. Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Dari sudut mana pun kita melihat konflik, bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Dalam kenyataan kehidupan manusia dimana pun dan kapan pun selalu ada bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan, dan kebutuhan-kebutuhan yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian itulah yang akan mengarah pada suatu perubahan.

Bulotalangi Barat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, desa ini memiliki 4 dusun yaitu dusun 1, 2, 3 dan 4. Desa Bulotalangi Barat berada pada ketinggian 1.500 Meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data desa jumlah penduduk pada 28 Januari 2021 tercatat 1.270 jiwa, laki-laki berjumlah 634 jiwa sedangkan perempuan 636 jiwa. Jumlah kepala keluarga 365 jiwa. Berdasarkan data desa terdapat empat sumber air diantaranya: (1) depot isi ulang air bersih berjumlah 1 unit dan digunakan oleh

58 KK, (2) mata air berjumlah 1 unit dan di gunakan oleh 7 KK, (3) air PDAM Berjumlah 170 unit dan digunakan oleh 150 KK, (4) sumur gali berjumlah 65 unit dan digunakan oleh 168 KK, jadi dapat disimpulkan masyarakat Desa Bulotalangi Barat lebih dominan menggunakan air PDAM, akan tetapi air PDAM tidak berjalan dengan lancar sehingga menyebabkan air tidak mengalir dengan baik, apalagi masyarakat yang berada di dusun 4 yang hanya mengandalkan air PDAM sedangkan letak geografis pemukiman penduduk berada di ketinggian dari pipa distribusi, sehingga akses air bersih tidak mencakup rumah penduduk yang berada pada tempat yang lebih tinggi sedangkan batas maksimal PDAM agar mengalir disetiap rumah warga yaitu sekitar 1. 200 meter di atas permukaan laut. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi kurangnya ketersediaan air di Desa Bulotalangi Barat yaitu curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan pipa-pipa distribusi air PDAM mengalami kerusakan.

Situasi seperti ini membawa masyarakat desa Bulotalangi Barat kedalam kondisi kehidupan yang jauh dari kesejahteraan, kesejahteraan sosial umumnya yaitu ketika kebutuhan sosial, dan kesehatan, jika kedua hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka masyarakat tersebut dapat dikatakan masyarakat yang hidup di di bawa garis kesejateraan, kondisi ini membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah setempat agar mata rantai kesejateraan pada kehidupan masyarakat desa Bulotalangi Barat bisa terputus.

Dari permasalahan yang terjadi, masyarakat setempat mengeluhkan masalah ini ke kepala desa sehingganya pada awal tahun 2020 pemerintah desa setempat memberikan bantuan 1 unit mesin air DAP, mesin air DAP tersebut digunakan oleh 11 kepala rumah tangga yang merupakan masyarakat yang mengalami kurangnya air bersih di desa Bulotalangi Barat tepatnya di dusun IV. Adanya bantuan mesin air DAP ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan tetapi seiring berjalannya waktu adanya mesin air DAP ini menimbulkan konflik di masyarakat, dikarenakan air DAP hanya ada satu sumber kran untuk 11 kepala rumah tangga yang menjadi pemanfaat air bersih, pemicu terjadinya konflik di masyarakat diantaranya adalah: (1) saling berebut ketika mengambil air, (2) jenuhnya masyarakat saat mengantri

untuk mengambil air, (3) ketidaksesuaian kesepakatan dalam hal ini masyarakat setempat sudah sepakat ketika mengambil air di batasi dengan waktu satu jam akan tetapi belum satu jam air sudah di matikan. Hal ini yang mengakibatkan perdebatan di masyarakat yang berujung pada konflik antar masyarakat. Oleh karena itu masyarakat setempat sangat membutuhkan perhatian dan penanganan penuh dari pihak pemerintah desa. Demikian halnya dalam pemerintahan, kepala desa pemegang tertinggi di tingkat desa tersebut. Maka dari itu kepala desa yang memiliki peranan sebagai fasilitator dan motivator sudah seharusnya memfasilitasi dan memotivasi masyarakat yang berkonflik serta mencari alternatif penanganan penyebab adanya konflik di masyarakat khususnya konflik air bersih. Jika permasalahan ini tidak di atasi maka hal ini tentunya akan menjadi konflik yang lebih besar dan hingga memungkinkan terjadinya perang antar masyarakat yang berada di desa Bulotalangi Barat.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yaitu pendekatan kualitatif. (Creswell, 2012) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif informan) lebih ditonjolkan dalam pendekatan kualitatif. Kajian teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Kajian teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi biasanya bertanya, menganalisis, dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi jelas.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data

dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Secara metodologis dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data, diantaranya :

1. Observasi

Tabel Pedoman Observasi Penelitian

No	Fokus Penelitian	Aktivitas
1.	Peran Kepala Desa	Melihat aktivitas peranan kepala desa dalam penyelesaian konflik.
2.	Konflik Masyarakat	Melihat penyebab konflik masyarakat
3.	Penangan Konflik	Menilai Peran Kepala desa dalam penanganan konflik

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa lebih khususnya kepala desa dan masyarakat dalam penanganan konflik.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber pada focus penelitian. Dalam melakukan wawancara sangat diperlukan informan yang memiliki keterlibatan terhadap objek yang diteliti.

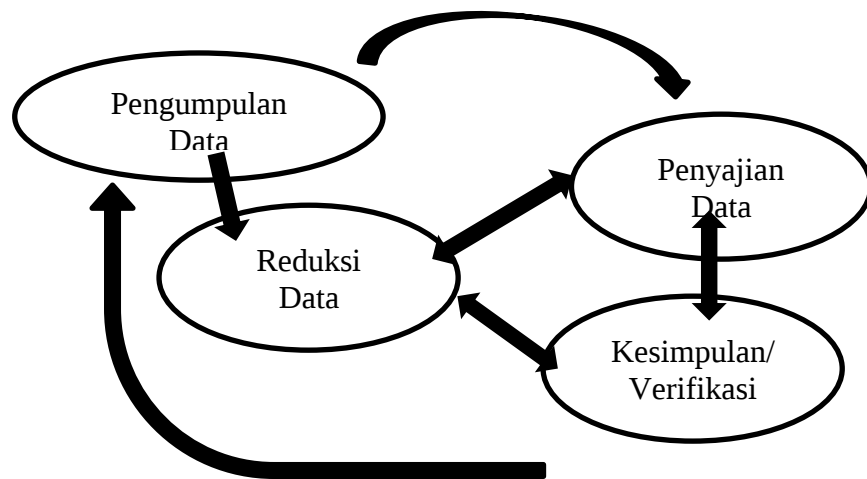
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian dengan judul “ Peran Kepemimpinan Kepala Desa Di Desa Bulotalangi Barat (Studi Kasus Dalam Penanganan Konflik Di Desa Bulotalangi Barat)” ialah kepala desa Bulotalangi Barat, sekretaris desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan, empat orang masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti yang berasal dari data yang berbentuk arsip(dokumen), karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen

elektronik. Dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Analisis data yang dilakukan sebelum peneliti terjun kelapangan merupakan analisis pada penelitian terdahulu atau data sekunder yang digunakan untuk menemukan dan menentukan fokus penelitian. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020:132) mengemukakan model analisis data sebagai berikut:



Gambar 3.1. Analisis data Model Miles dan Huberman (1984)

1. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama dalam setiap penelitian. Pada umumnya pengumpulan data pada penelitian menggunakan kuesioner atau tes tertutup, namun dalam penelitian kualitatif pengumpulan data di peroleh melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Pengumpulan data dapat dilakukan sehari-hari atau berbulan-bulan sehingga data yang diperoleh akan banyak.

2. Reduksi Data

Semakin lama peneliti ke lapangan maka semakin banyak juga data yang dimiliki, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci serta segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting , dicari teman dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah yang dilakukan setelah data direduksi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020:137) mengemukakan bahwa “yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.” Lebih lanjut Miles dan Huberman mengatakan bahwa dalam melakukan penyajian data, selain dengan bentuk teks naratif, dapat juga berupa matriks, grafik, jejaring kerja dan *chart*.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran sesuatu objek yang awalnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin saja dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, dan mungkin saja tidak. Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Untuk mendapatkan data yang akurat maka dalam penelitian ini dilakukan berbagai metode, salah satunya dengan menggunakan metode observasi dalam pelaksanaan observasi ini digunakan beberapa instrument pengamatan, dengan maksud memudahkan dan agar dalam penelitian ini tidak melebar pada hal substansi atau focus penelitian itu sendiri. Untuk melihat bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam Penanganan Konflik Air Bersih di Desa Bulotalangi Barat. Maka yang dikaji dalam penelitian ini, di lihat dari beberapa indikator, yaitu : a) Fasilitator. b) Motivator. c) Musyawarah. d) Campur Tangan Pihak Ketiga. e) Tawar-menawar.

Berdasarkan hasil observasi atau data dalam penelitian ini adapun aspek-aspek yang peneliti amati. Berdasarkan hasil observasi ataupun temuan-temuan yang dapat dikemukakan peneliti dalam penelitian peran kepemimpinan kepala desa di Desa Bulotalangi Barat(studi kasus konflik air bersih di Desa Bulotalangi Barat) yakni sebagai berikut :

1. Peran Kepala Desa

Dalam urusan bidang kemasyarakatan kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa. Kepala desa dan pemerintah desa berupaya memfasilitasi atau memediasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hasil observasi konflik yang timbul di masyarakat merupakan konflik yang disebabkan minimnya ketersediaannya air bersih sehingga dalam penanganan masalah tersebut kepala desa dan pemerintah desa telah berupaya mengatasi persoalan, kepala desa dan pemerintah desa telah membangun dua unit air mesin DAP untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

2. Kondisi Sarana Air Bersih dan Sanitasi Desa Bulotalangi Barat

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa masyarakat desa Bulotalangi Barat lebih dominan menggunakan air PDAM, masyarakat sangat bergantung pada air PDAM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi air PDAM kadang kala tidak ada airnya sehingga masyarakat memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan masyarakat setempat membeli air pada salah satu masyarakat yang berada di desa tetangga yang perjamnya itu di bayar Rp. 10.000. Seiring berjalannya waktu pemerintah desa menyediakan 1 unit mesin air DAP dan digunakan oleh masyarakat setempat. Akan tetapi adanya bantuan tersebut menimbulkan konflik antar masyarakat, konflik ini di sebabkan karena penjenjutan masyarakat dalam menunggu antrian pengambilan air di mesin DAP tersebut sehingganya pada tahun 2022 pemerintah desa dan kepala desa menyediakan lagi satu unit mesin air DAP.

3. Kebutuhan Masyarakat Mengenai Air Bersih

Dalam kehidupan sehari-hari air bersih merupakan sumber kehidupan manusia yang berkelanjutan, yang keberadaannya sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat baik musim kemarau maupun musim penghujan.

4. Dinamika Konflik di Desa Bulotalangi Barat

Desa Bulotalangi Barat merupakan salah satu desa yang tidak lepas dari adanya konflik, seperti desa-desa pada umumnya. Konflik antar masyarakat yang pernah terjadi di Desa Bulotalangi Barat diantaranya konflik air bersih, penyebab adanya konflik tersebut sangat beragam seperti adu argumen antar masyarakat. Biasanya konflik yang terjadi dapat ditangani oleh masyarakat sekitar atau kepala desa sendiri, walaupun demikian dari berbagai macam konflik yang ada di Desa Bulotalangi Barat tidak semuanya dapat teratasi dengan baik.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini membahas tentang peran kepemimpinan kepala desa di desa Bulotalangi Barat (studi kasus dalam penanganan konflik air bersih di desa Bulotalangi Barat), peneliti membahas penelitian ini secara deskriptif.

Dalam bidang kemasyarakatan kepala desa berperan penting dalam membina hubungan kehidupan di masyarakat, untuk mencapai tujuan serta memperlancar atau mempermudah hal tersebut, maka kepala desa dibantu oleh unsur pemerintah lainnya.

Peran kepemimpinan kepala desa dalam konteks fasilitator seperti yang dinyatakan oleh Armansyah (2022:2674) peran kepala desa sebagai fasilitator, bahwa kepala desa menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan, sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan desa.

Kepemimpinan kepala desa di Bulotalangi Barat yang ditinjau dari aspek fasilitator diperoleh bahwa strategi yang digunakan oleh kepala desa dan unsur pemerintah desa lainnya dalam menangani konflik air bersih yaitu dengan mengadakan musyawarah untuk menuju mufakat, dalam hal ini kepala desa yang memiliki kedudukan atau status sehingga kepala desa memediasi apa yang menjadi kebutuhan di dalam masyarakat. Disisi lain peran kepala desa sebagai

fasilitator cukup membantu masyarakat Bulotalangi Barat hal ini terlihat sesuai realita yang di dapatkan di lapangan menunjukkan bahwa kepala desa mampu memfasilitasi masyarakat dengan mengadakan kembali sarana air bersih yang merupakan pemicu terjadinya konflik yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat, sehingga adanya pengadaan kembali sarana air bersih ini, masalah yang di masyarakat bisa dikatakan sudah tidak ada lagi.

Salah satu peran kepemimpinan adalah sebagai motivator (Ismail dan Razak, 2020:58). Kepala desa Bulotalangi Barat sebagai seorang pemimpin dalam satu wilayah, ia harus bertindak pula sebagai motivator bagi warganya, terutama warga yang mempunyai berbagai persoalan. Dalam penanganan konflik yang terjadi di desa Bulontalangi Barat, ia juga bertindak sebagai motivator, dengan selalu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara bersama, dan membuang rasa egosentris masyarakat, karena persoalan air adalah ada persoalan bersama, dan bukan persoalan individual di masyarakat Bulotalangi Barat.

Disamping sebagai motivator, seorang pemimpin juga harus mampu mengakomodir berbagai masukan yang berasal dari masyarakat, berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dapat di pecahkan melalui jalan musyawarah mufakat. Dalam konsep musyawarah Zainuddin (2016:13) menyatakan bahwa musyawarah dilakukan agar pihak-pihak yang bertentangan dapat mencari penyelesaian terbaik bagi masalah yang sedang dihadapi, bukan mencari kemenangan sepihak.

Peran kepala desa sebagai seorang pemimpin dalam penanganan konflik di desa Bulotalangi Barat selalu mengedepankan musyawarah untuk menuju mufakat dalam hal ini kepala desa mengundang pihak-pihak yang terlibat terkait konflik air bersih, pada realita yang ditemukan didalam lapangan oleh peneliti ada yang berbeda pendapat tentang apa yang di musyawarahkan dalam hal ini masyarakat mempertahankan apa yang menjadi pendapatnya dan ini menjadi suatu tantangan yang di hadapi oleh kepala desa dan unsur pemerintah lainnya ketika menyatukan persepsi setiap masyarakat, dalam hal ini kepala desa sebagai pemimpin dan

mediaotor tidak memihak kepada siapapun dan netral dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, untuk hasil atau jalan keluar yang di dapatkan harus sesuai dengan keinginan masing-masing atau dalam hal ini saling menguntungkan satu sama lain.

Di dalam musyawarah yang dilakukan yang di mediasi langsung oleh kepala desa dan pemerintah desa saling melakukan tawar menawar persetujuan dalam hal ini di pemerintahan lebih memprioritaskan pembangunan air bersih ini di dusun IV dikarenakan dusun ini berada pada dataran tinggi sedangkan tawar menawar persetujuan yang ada di masyarakat lebih ke prasarananya contohnya seperti listrik yang di gunakan, listrik yang di gunakan rata-rata menggunakan listrik pemilik lahan, dari hasil tawar menawar yang dilkukan mengenai harga perjamnya di sepakati Rp. 10.000 akan tetapi tawar menawar yang dilakukan tidak sesuai karena pada realitanya belum satu jam air di matikan sehingga ini salah satu pemicu terjadinya masalah.

Selama konflik yang terjadi terkait air bersih sejauh ini pihak ketiga di dalam masyarakat masih kepala desa yang menangani persoalan tersebut dan unsur pemerintah lainnya, tidak sampai di pihak berwajib TNI-POLRI, sekalipun mereka ada hanya mendampingi selagi dalam musyawarah tersebut masih aman dan kondusif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa sebagai fasilitator diperoleh bahwa strategi yang digunakan oleh kepala desa dan unsur pemerintah desa lainnya dalam menangani konflik air bersih yaitu dengan di adakan musyawarah untuk menuju mufakat, dalam hal ini kepala desa yang memiliki kedudukan atau status sehingganya kepala desa memediasi apa yang menjadi kebutuhan didalam masyarakat. Disisi lain peran kepala desa sebagai fasilitator cukup membantu masyarakat Bulotalangi Barat hal ini terlihat sesuai realita yang di dapatkan di lapangan menunjukkan bahwa kepala desa mampu memfasilitasi masyarakat dengan mengadakan kembali sarana air bersih yang merupakan pemicu terjadinya konflik yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat, sehingga adanya pengadaan kembali

sarana air bersih ini, masalah yang di masyarakat bisa dikatakan tidak ada lagi. Dalam penanganan konflik yang terjadi di desa Bulontalangi Barat, kepala desa juga bertindak sebagai motivator, dengan selalu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara bersama, dan membuang rasa egosentris masyarakat, karena persoalan air adalah persoalan bersama, dan bukan persoalan individual di masyarakat Bulotalangi Barat.

REFERENSI

- Armansyah. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Mengelolah Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Proponsi Riau. *JIP : Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 8 Januari. Hal. 2674
- Creswel, Noor, (2012), *Research Design Pendekatan Kualitatif. Kuantitatif Dan Mixed*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Dasrizal, F. (2016). Peranan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Desa Tahun 2015. *TanjungPinang : Jurnal Ilmu Pemerintahan* Hal. 8
- Ismail, I. N., & Razak, M. R. R. (2020). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Cemba Kecamatan Enrekang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, Volume 8. No 1, Edisi Maret. 57-63.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin, D. (2016) . Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta). *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7. No, Hal 13.